

Manajemen Pelaporan Keuangan Digital Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Cindy Claudia Magi Diala, MN Romi A Setiawan, Nanang Bagus

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email korespondensi: cindyclaudiamagidiala@gmail.com

Abstract

The implementation of digital financial management at the village level remains a critical issue, particularly in ensuring transparency, accountability, and the quality of financial reporting. Although the Village Financial System (SISKEUDES) has been widely adopted, empirical studies examining how this system supports digital financial reporting management at the village level are still limited. This study aims to analyze the management of digital financial reporting through SISKEUDES and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. The study adopts a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using reduction, display, and conclusion-drawing techniques. The analysis is guided by the qualitative characteristics of financial reporting in the public sector, including relevance, reliability, understandability, and comparability. The findings indicate that the implementation of SISKEUDES in Kalisongo Village has improved the quality of digital financial reporting, particularly in terms of accuracy, efficiency, and transparency. However, several challenges remain, especially related to internet connectivity and technical constraints. Overall, SISKEUDES plays a significant role in strengthening digital financial reporting management at the village level, although continuous system and infrastructure improvements are still required.

Keywords: Digital Financial Reporting; Kalisongo Village; Siskeudes; Village Financial Management

Abstrak

Penerapan pengelolaan keuangan digital di tingkat desa masih menjadi isu penting, terutama dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Meskipun Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah banyak digunakan, kajian yang membahas secara empiris pengelolaan pelaporan keuangan digital di tingkat desa masih terbatas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaporan keuangan digital melalui SISKEUDES serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis didasarkan pada karakteristik kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES di Desa Kalisongo mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan digital, terutama dari sisi ketepatan, efisiensi, dan transparansi. Namun demikian, masih terdapat kendala, terutama terkait keterbatasan jaringan internet dan aspek teknis sistem. Secara keseluruhan, SISKEUDES berperan penting dalam memperkuat manajemen pelaporan keuangan digital di tingkat desa, meskipun perbaikan sistem dan infrastruktur tetap diperlukan.

Kata kunci: Digital Financial Reporting; Desa Kalisongo; Manajemen Keuangan Desa; Siskeudes

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati oleh Sistem Negara

1 | Diala, C. C. M., Setiawan, M. N. R. A., & Bagus, N. (2026). Manajemen pelaporan keuangan digital melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Indonesian Social Science Review (ISSR)*, 4(1), 1–12. DOI <https://doi.org/10.61105/issr.v4i1.185>

Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat dan memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tarigan & Lubis, 2016). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban anggaran, sehingga setiap desa berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana publik (Nafidah & Anisa, 2017; Wiguna & Dwilingga, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja perangkat desa. Pengungkapan berbasis laporan digunakan oleh masyarakat untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa serta menjadi media untuk menunjukkan bahwa seluruh informasi pengelolaan keuangan desa disampaikan secara transparan dan dapat dipercaya (Sulistiyowati et al, 2024). Pemerintah desa juga dituntut memiliki kemampuan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Puspa & Prasetyo, 2020). Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga penyajiannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Alfianto, 2025).

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang merepresentasikan kinerja serta kapasitas pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Malik, 2020). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pelaporan keuangan desa secara konvensional masih sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti proses pencatatan manual yang memakan waktu, risiko kesalahan pencatatan, serta keterbatasan dalam menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan mudah diakses. Kondisi ini turut memunculkan keluhan masyarakat terkait pengalokasian anggaran yang dinilai belum sesuai dengan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Laru & Suprojo, 2019).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sebuah sistem berbasis digital untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai diluncurkan dan digunakan secara nasional sejak tahun 2015. Implementasi SISKEUDES juga diperkuat melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa serta Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang merekomendasikan penggunaan sistem ini dalam pengelolaan dana dan keuangan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan alat bantu yang dirancang untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan (Ra'is, 2020). Penerapan SISKEUDES bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pelaporan keuangan serta memperkuat pengawasan dan

pengendalian pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Selain membantu pemerintah desa, aplikasi ini juga memungkinkan BPKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Desa Kalisongo merupakan salah satu desa yang telah mengadopsi dan menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2015. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mengatasi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti lamanya proses penyusunan laporan dan potensi kesalahan pencatatan. Meskipun demikian, berdasarkan praobservasi di Pemerintah Desa Kalisongo, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam penggunaan SISKEUDES, terutama terkait aspek keamanan data dan kerentanan sistem apabila tidak didukung oleh pengelolaan dan infrastruktur teknologi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan digital di tingkat desa masih memerlukan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penggunaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen pelaporan keuangan digital melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kalisongo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta konteks pengelolaan keuangan desa sebagaimana terjadi secara alamiah di lapangan (Sugiyono, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Pemerintah Desa Kalisongo untuk mengamati proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa menggunakan SISKEUDES. Kedua, wawancara mendalam dilakukan kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, seperti kepala desa dan perangkat desa yang berperan sebagai operator SISKEUDES, guna memperoleh informasi terkait prosedur, kendala, serta manfaat penggunaan sistem tersebut. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen keuangan desa, laporan hasil pengelolaan keuangan, serta arsip dan bukti administrasi yang relevan dengan penggunaan SISKEUDES.

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan cara membandingkan temuan lapangan dan kerangka konseptual penelitian guna memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pelaporan Keuangan Digital melalui SISKEUDES di Desa Kalisongo

Pembahasan hasil penelitian ini dianalisis dengan merujuk pada karakteristik kualitatif laporan keuangan sektor publik, sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi dan regulasi pengelolaan keuangan desa, yaitu relevan (relevance), andal (reliability), dapat dipahami (understandability), dan dapat dibandingkan (comparability). Keempat karakteristik ini

digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana penerapan SISKEUDES di Desa Kalisongo mampu mendukung kualitas pelaporan keuangan digital.

Dengan menggunakan kerangka tersebut, pembahasan tidak hanya mendeskripsikan penggunaan SISKEUDES secara teknis, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

1. Relevansi Informasi dalam Pelaporan Keuangan Desa

Relevansi merupakan salah satu karakteristik utama laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan informasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Informasi keuangan dikatakan relevan apabila disusun berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dan berkaitan langsung dengan proses perencanaan serta pelaksanaan program desa.



Gambar 1. Musyawarah Desa
Sumber: Data sekunder, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan digital melalui SISKEUDES di Desa Kalisongo memiliki tingkat relevansi yang cukup baik, terutama karena penyusunan laporan keuangan berkaitan langsung dengan proses musyawarah desa dan musyawarah dusun. Keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut menjadi dasar awal dalam menentukan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam perencanaan keuangan desa.

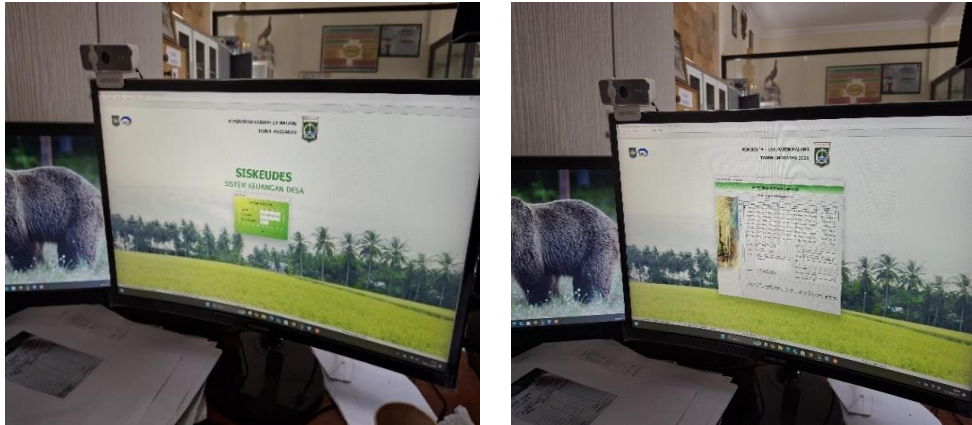
Masukan dan usulan dari masyarakat tidak secara otomatis seluruhnya direalisasikan, melainkan disesuaikan dengan kapasitas keuangan desa dan ketersediaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan anggaran yang realistis. Penggunaan SISKEUDES membantu memastikan bahwa transaksi dan alokasi anggaran yang telah disepakati dapat dicatat secara sistematis, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tetap berkaitan langsung dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan pembangunan desa.

2. Keandalan Informasi Keuangan melalui Sistem Digital

Keandalan (reliability) dalam laporan keuangan mengacu pada sejauh mana informasi yang disajikan dapat dipercaya, bebas dari kesalahan material, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, keandalan sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan, prosedur verifikasi, dan konsistensi dalam penginputan data.

4 | Diala, C. C. M., Setiawan, M. N. R. A., & Bagus, N. (2026). Manajemen pelaporan keuangan digital melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Indonesian Social Science Review (ISSR)*, 4(1), 1–13. DOI

Sesuai dengan Gambar 2 di bawah, penggunaan aplikasi ini di Desa Kalisongo menunjukkan adanya standarisasi dalam proses input data yang terintegrasi. Tampilan antarmuka sistem tersebut mempermudah perangkat desa dalam mengorganisir pos-pos anggaran secara sistematis, sehingga meminimalisir risiko manipulasi data manual. Dengan adanya visualisasi proses digital ini, terlihat bahwa teknologi berperan sebagai kontrol internal yang kuat dalam menjaga konsistensi laporan dari tahap perencanaan hingga pelaporan akhir.



Gambar 2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Kalisongo
Sumber: Data sekunder, 2024

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan digital yang disajikan benar-benar andal, Desa Kalisongo telah menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya karena dilengkapi dengan fitur pendeteksi kesalahan pada saat proses input data. Fitur ini memungkinkan kesalahan pencatatan diperbaiki sebelum laporan disusun, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penggunaan SISKEUDES mempermudah proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan melalui sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya mekanisme validasi data dalam sistem, potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Keandalan laporan keuangan yang dihasilkan melalui SISKEUDES juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, karena setiap transaksi dapat ditelusuri dan diaudit apabila diperlukan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. SISKEUDES dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan tersebut dalam satu sistem yang saling terhubung.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. SISKEUDES dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan tersebut dalam satu sistem yang saling terhubung. Penjelasan mengenai alur integrasi ini dapat dilihat secara sistematis pada Gambar 3. Tahapan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Siskeudes. Gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga

pertanggungjawaban, mengalir secara sekuensial dalam aplikasi. Proses ini memastikan bahwa setiap data yang diinput pada tahap awal akan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya, sehingga menciptakan siklus pelaporan yang koheren dan meminimalisir risiko ketidaksinkronan data antar dokumen keuangan.



Gambar 3. Tahapan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Siskeudes

Sumber: Data sekunder, 2025

Pada tahap perencanaan, proses input data dilakukan melalui menu entri data yang terdiri dari tiga bagian, yaitu data umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), ekspor data RPJMDes, serta impor data RPJMDes. RPJMDes yang telah disahkan diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES melalui menu entri data pada bagian perencanaan. Namun, data yang dimasukkan pada tahap ini hanya mencakup data umum, seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal peraturan desa, serta informasi terkait visi, misi desa, dan RPJMDes. Pembatasan jenis data yang diinput pada tahap perencanaan ini menunjukkan bahwa SISKEUDES menerapkan pemisahan yang jelas antara fungsi perencanaan strategis dan fungsi penganggaran, sehingga dokumen perencanaan tidak langsung bercampur dengan aspek teknis keuangan dan tetap menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah desa.

Kemudian, dalam tahap penganggaran diisi data yang berkaitan dengan anggaran, termasuk anggaran kas desa, peraturan APBDes, posting APBDes, anggaran lanjutan, ekspor, impor, dan impor data RAB parsial. Pada tahap ini, operator aplikasi SISKEUDES menginput data anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, bidang, dan subbidang. Data tersebut digunakan untuk menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang didasarkan pada bukti transaksi dan surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan. SPP dicetak setelah seluruh data dimasukkan dan dilakukan proses pengecekan atau validasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa SISKEUDES tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian administratif yang memastikan bahwa setiap pengeluaran desa memiliki dasar dokumen yang sah sebelum dilakukan pencairan dana.

Dalam tahap penatausahaan, terdapat beberapa menu penting, yaitu penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, pengembalian, penyetoran pajak, mutasi kas, output dana desa, serta ekspor dan impor data. Operator aplikasi SISKEUDES melakukan penginputan data terkait penerimaan kas yang telah diterima, yang meliputi tanggal transaksi, jumlah transaksi,

bank penyetoran, penanggung jawab, serta jenis penerimaan kas seperti pendapatan swadaya. Seluruh proses ini dilakukan melalui menu entri data pada bagian penatausahaan, khususnya pada menu penerimaan. Tahap ini menunjukkan bahwa SISKEUDES mendukung pencatatan transaksi secara rinci dan sistematis, sehingga arus kas desa dapat ditelusuri dengan jelas dan meminimalkan potensi kesalahan atau kehilangan data keuangan.

Pada tahap pelaporan, aplikasi SISKEUDES secara otomatis menghasilkan laporan keuangan setelah operator menyelesaikan proses input seluruh data dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan. Laporan yang dihasilkan meliputi Laporan Realisasi APBDes, Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA) per kegiatan, LRA bulanan, triwulanan, dan semesteran. Selain itu, dihasilkan pula Laporan Realisasi APBDes Semesteran, Laporan Kinerja Masyarakat dan Desa (LKMD), Laporan Realisasi APBDes berdasarkan sumber dana 1a dan 1b, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Penyerapan Dana Desa berdasarkan PMK, serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja Tak Terduga (BTT). Keberagaman jenis laporan ini menunjukkan bahwa SISKEUDES mampu menyediakan informasi keuangan yang komprehensif untuk kebutuhan pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Semua laporan yang dihasilkan melalui aplikasi SISKEUDES dapat diakses dengan mudah melalui menu laporan pada bagian pembukuan. Laporan pertanggungjawaban mencakup berbagai dokumen penting, seperti Laporan Realisasi APBDes, LRA Desa, LRA Desa per Kegiatan, serta LRA dalam periode bulanan, triwulanan, dan semesteran. Selain itu, tersedia pula Laporan Realisasi APBDes Semesteran, LKMD, serta laporan realisasi APBDes per sumber dana 1a dan 1b, dan laporan penggunaan Dana Desa. Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK) dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT juga disediakan. Untuk memastikan pertanggungjawaban secara offline, aparat desa melakukan pencetakan laporan, sementara softfile laporan tetap disimpan dan dapat diakses melalui aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah setempat, yang menunjukkan integrasi antara transparansi administratif dan kebutuhan dokumentasi formal.

Keterpahaman Informasi Pelaporan Keuangan Desa melalui SISKEUDES

Dapat dipahami merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang menunjukkan bahwa informasi harus disajikan secara jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Kualitas keterpahaman ini menjadi penting dalam konteks pelaporan keuangan desa karena sasaran utama informasi tidak hanya aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat desa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam. Indikator dapat dipahami digunakan untuk menilai sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran dari pembuatan informasi tersebut, khususnya masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Gambar 4. Banner APBDes Desa Kalisongo, seluruh rincian pemasukan dan pengeluaran dana desa disebutkan secara detail dan transparan. Visualisasi pada banner tersebut menyajikan angka-angka anggaran secara gamblang, mulai dari sumber pendapatan desa hingga alokasi belanja untuk tiap bidang pembangunan. Banner tersebut disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga masyarakat Desa Kalisongo dapat mengetahui informasi terkait APBDes dan penggunaan dana desa secara langsung. Selain itu, pemerintah Desa Kalisongo juga memanfaatkan website resmi desa untuk mempublikasikan informasi laporan keuangan, yang

memperluas akses informasi serta memperkuat keterampilan masyarakat terhadap kondisi keuangan desa secara berkelanjutan

Untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh masyarakat, Pemerintah Desa Kalisongo telah membuat banner informasi keuangan yang dipasang di beberapa titik strategis, seperti kantor desa dan balai desa. Penempatan banner di ruang publik menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menyederhanakan informasi keuangan agar dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa melalui prosedur administratif yang rumit. Banner tersebut disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga masyarakat Desa Kalisongo dapat mengetahui informasi terkait APBDes dan penggunaan dana desa. Selain itu, pemerintah Desa Kalisongo juga memanfaatkan website resmi desa untuk mempublikasikan informasi laporan keuangan, yang memperluas akses informasi serta memperkuat keterampilan masyarakat terhadap kondisi keuangan desa secara berkelanjutan.



Gambar 4. Banner APBDes Desa Kalisongo

Sumber: Data Sekunder, 2024

Keterbandingan Pelaporan Keuangan Desa sebelum dan sesudah Penerapan SISKEUDES

Dapat dibandingkan merupakan karakteristik laporan keuangan yang memungkinkan pengguna membandingkan informasi keuangan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Selain itu, keterbandingan juga memungkinkan perbandingan antarentitas untuk menilai posisi keuangan secara relatif. Dalam konteks penelitian ini, keterbandingan merujuk pada kondisi pelaporan keuangan Desa Kalisongo sebelum dan sesudah penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

BUKU KAS UMUM (BKU)

2					Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.
Nomor Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian			
					57.008.000	-
8	18-08-2011	1.2	Tenmu ADD Tahap II			8.500.000
9	18-08-2011	2.7	Belanja Operasional LPMD			6.800.000
10	18-08-2011	2.8	Belanja Operasional BPD			12.640.000
11	18-08-2011	2.9	Belanja Operasional PKK			8.950.000
12	18-08-2011	2.10	Belanja Operasional RT dan RW			4.000.000
13	18-08-2011	2.11	Belanja Peningkatan Kehidupan Masyarakat			3.750.000
14	18-08-2011	2.12	Belanja Peningkatan KAMTIBMAS			12.000.000
15	18-08-2011	2.13	Belanja Tunjangan Penghasilan Parangkiat Desa			2.300.000
16	18-08-2011	2.14	Belanja Operasional Penyelenggaraan Pem. Des			
Jumlah bulan / tanggal 30 Agustus 2011					57.008.000	56.940.000
Jumlah sampai bulan lalu					0	4000
Jumlah semua s/d bulan / tanggal 30 Agustus 2011					Rp 57.008.000	56.944.000
S i s a						64.000

Pada hari ini tanggal 30 Agustus 2011 Oleh kami di dapat dalam kas
Rp 64.000 (Enam puluh empat ribu rupiah)

PTPKD Bendahara Desa

(SAMPURI) (WUARIP)

Gambar 5. Bentuk Pelaporan Keuangan Sebelum Adanya Siskeudes
Sumber: Data Sekunder, 2025

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KALISONGO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : KECAMATAN DAU
KABUPATEN : KABUPATEN MALANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2022		Saldo Sebelumnya	584.304.646,63	0,00		584.304.646,63	584.304.646,63
2	04/04/2022		Tenmu Transfer DDIS Tahap I (60%)					
3	04/04/2022	4.2.1.01.	Dana Desa	344.056.800,00	0,00	0005/TP/22.2002/2022	344.056.800,00	928.361.446,63
4	04/04/2022	4.2.1.01.	Dana Desa	97.200.000,00	0,00	0006/TP/22.2002/2022	97.200.000,00	1.025.561.446,63
5	18/04/2022	7.1.1.02.	Pembayaran Konsultan Rest Area Desa Kalisongo	500.000,00	0,00	00004/KWT/22.2002/2022	500.000,00	1.026.061.446,63
6	18/04/2022	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terulangi	0,00	32.400.000,00	0001/SP/22.2002/2022	(32.400.000,00)	993.661.446,63
7	18/04/2022	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terulangi	0,00	32.400.000,00	0002/SP/22.2002/2022	(32.400.000,00)	961.261.446,63
8	18/04/2022	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terulangi	0,00	32.400.000,00	0003/SP/22.2002/2022	(32.400.000,00)	928.861.446,63
9	18/04/2022	5.2.2.04.	Konsultan Pembangunan Rest Area Desa Kalisongo	0,00	10.500.000,00	0004/SP/22.2002/2022	(10.500.000,00)	918.361.446,63
10	18/04/2022	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.531.450,00	0005/SP/22.2002/2022	(1.531.450,00)	916.829.996,63
11	18/04/2022	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	290.240,00	0006/SP/22.2002/2022	(290.240,00)	916.539.756,63
12	21/04/2022	5.2.1.01.	Belanja Abat Tulus Kantor dan Benda Fis	0,00	513.300,00	0007/SP/22.2002/2022	(513.300,00)	916.026.456,63
			Tenmu Transfer ADD Tahap I (40%)					

Printed by Siskeudes 30/10/2023 12:12:30 Halaman 1

Gambar 6. Bentuk Pelaporan Keuangan Sesudah Adanya Siskeudes
Sumber: Data Sekunder, 2025

Sebelum menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, pelaporan keuangan di Desa Kalisongo masih dilakukan secara manual atau menggunakan dokumen fisik seperti file Excel

seederhana. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih lambat, kurang efisien, dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Selain itu, format dan konsistensi laporan keuangan cenderung tidak seragam antarperiode, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan perbandingan kinerja keuangan desa. Setelah SISKEUDES mulai digunakan, pengelolaan keuangan desa mengalami perubahan yang signifikan.

Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lama menjadi lebih cepat dan efisien, sementara data yang diinput ke dalam sistem secara otomatis tersusun dengan rapi dan konsisten, sehingga meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antarperiode serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meminimalisir *human error* dan mempercepat proses penyajian data (Pirayesh et al, 2018).

Pengelolaan SISKEUDES di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Pemerintah desa menjalankan pengelolaan keuangan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari perencanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat hingga proses pelaporan yang akuntabel dan transparan (Al-Hashimy et al, 2025).

Penerapan fungsi-fungsi manajemen ini krusial dalam organisasi sektor publik untuk memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya dilakukan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Latupeirissa et al, 2024; Overman & Schillemans, 2021). Seluruh pengelolaan keuangan desa dicatat menggunakan aplikasi SISKEUDES, yang mempermudah proses pelaporan serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, penggunaan SISKEUDES memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap penggunaan dana desa, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil.

Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan SISKEUDES di Desa Kalisongo

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan perangkat Desa Kalisongo, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Data lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, serta kondisi jaringan internet menjadi faktor utama yang memengaruhi kelancaran penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalisongo telah memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti komputer dan laptop, yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan desa. Ketersediaan fasilitas ini memungkinkan proses pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode manual. Selain itu, berdasarkan data wawancara, perangkat desa yang bertugas mengoperasikan SISKEUDES telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia ini mempermudah proses penginputan data serta penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalkan kesalahan administratif dan mendukung kelancaran pelaporan keuangan desa.

Selain faktor pendukung, data lapangan juga menunjukkan adanya faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Kalisongo. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, kendala utama yang dihadapi adalah kualitas jaringan internet yang belum stabil. Ketika jaringan mengalami gangguan atau error, aplikasi SISKEUDES menjadi sulit diakses dan sering mengalami kendala sistem, sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Meskipun Desa Kalisongo telah menggunakan jaringan wifi untuk mendukung akses internet, kondisi jaringan yang kurang stabil menyebabkan proses penginputan data dan penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SISKEUDES tidak hanya bergantung pada sistem dan sumber daya manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur jaringan yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaporan keuangan digital melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kalisongo telah berjalan dengan baik. Penggunaan SISKEUDES mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal (reliable), dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalisongo telah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Keberhasilan penerapan SISKEUDES di Desa Kalisongo didukung oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan fasilitas yang memadai seperti komputer dan laptop yang menunjang proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi SISKEUDES juga telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai, sehingga proses penginputan data dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lancar. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, yaitu kondisi jaringan internet yang belum stabil dan sering mengalami gangguan. Kendala jaringan ini berpotensi menghambat proses penyusunan laporan keuangan dan memperlambat kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara digital.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Desa Kalisongo melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas jaringan internet yang digunakan dalam pengoperasian SISKEUDES serta meningkatkan koordinasi dengan penyedia layanan jaringan guna memastikan kestabilan koneksi internet. Jaringan yang stabil akan mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa agar dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan SISKEUDES dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau membandingkan beberapa desa dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan perspektif masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan desa untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, A. N. (2025). Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes Bangkit Desa Sriwulan melalui Pelatihan Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 654-661.
- Al-Hashimy H, N, H., Yao J., Pitchay, A, A., (2025). Enhancing financial performance through computerized accounting information systems: the critical role of accounting information quality and top management support. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 1-25. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-06-2025-0230>
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367-371.
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming Public Service Delivery: A Comprehensive Review of Digitization Initiatives. *Sustainability*, 16(7), 2818. <https://doi.org/10.3390/su16072818>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Terjemahan. Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Overman, S., & Schillemans, T. (n.d.). Public Administration Review . *Public Administration Review*, 82(1), 12-22. <https://doi.org/10.1111/puar.13417>
- Pirayesh, R., Forouzandeh, M., & Louie, S. I. (2018). Examining the effect of computerized accounting information system on managers' decision making process. *Revista Publicando*, 5(14 (1), 68-82. <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/1100>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Ra'is, D. U. (2020). Pembangunan Demokrasasi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Kajian dari Sudut Pandang UU Nomor 6 Tahun 2014). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 31-42.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta
- Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866-873.
- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang penggunaan sistem tata kelola desa
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 167-17